


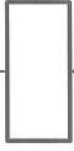






DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT

	NOMOR SOP : SOP/XX.A.a.23/DPMP/PTSP/KABBULELENG/2020
	TGL. PEMBUATAN : 29 Juni 2020
	TGL. REVISI : -
	TGL. EFEKTIF : 01 Juli 2020
	DISAHKAN OLEH : Sekretaris 
	<u>IDA AYU PANCANI YULIATY,S.H.M.SI</u> PEMBINA (I/v/a) NIP. 197107051997032009
DASAR HUKUM :	NAMA SOP : UJI KONSEKUENSI
1 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi semua Seksi, Subag 3. Memahami daftar informasi dan dokumen dari masing-masing bidang
2 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	
3 PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
4 Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	
5 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Daftar/klasifikasi Informasi 2. Komputer/Laptop dan Printer 3. Alat Tulis Kantor, Flasdisk, CD, dll
1. SOP Pelayanan	
2. SOP Surat Masuk	
3. SOP Surat Keluar	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDITAAN : Data kinerja disimpan secara Elektronik dan Manual
Bila SOP ini dilaksanakan berdampak pada rendahnya mutu pelayanan informasi publik	

IV. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI

No.	Kegiatan	Baku Mutu				Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Pemohon	PPID Pembantu	Atasan PPID					
1	Pemohon Informasi Publik								
2	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang dimohon yang diduga mengandung informasi yang di kecualikan. Mita pertimbangan kepada Atasan PPID/Tim Pertimbangan Pemohonan Informasi				Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon	2 hari	Hasil kajian tentang informasi publik yang dimohon		
3	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang yang bersifat rahasia berdasarkan Undang-undang Keperaturan dan Kepentingan Umum				Perundang-undangan yang dibutuhkan : UU KIP dan Perki I/2010 dan UU lainnya	1 hari	Surat Pertimbangan		
4	Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi/dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada penguasa informasi/dokumen (SKPD) untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud, jika status informasi/dokumen dikecualikan PPID membuat surat penolakan.				Informasi/dokumen yang dimohon	2 hari	Surat Keputusan PPID tentang informasi yang dikecualikan		
5	Memberikan tanggapan permohonan informasi				Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut dikategorikan rahasia	1 hari	Surat Keputusan Penolakan Permohonan Informasi		